



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

# **RENCANA KERJA AKHIR (RENJA AKHIR)**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**KAB. KUTAI KARTANEGARA**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 2  
JALAN WOTER MONGINSIDI TENGGARONG 75511 Email: [pppa.kabkukar@yahoo.com](mailto:pppa.kabkukar@yahoo.com) / [dinaspppa.kukarkab@gmail.com](mailto:dinaspppa.kukarkab@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR : **P-5/PROGKEU/900.1.2/03/2025**

T E N T A N G  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

- KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 221 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
  9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tepat waktu;
  - g. melaporkan hasilnya pada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selaku Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 17 Maret 2025

=====



- Tembusan Yth :
- 1. Bupati Kutai Kartanegara ;
  - 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 3. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - 4. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  - 5. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA  
NOMOR : **P-5/PROGKEU/900.1.2/03/2025**  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2025

- a. Pengarah/Penangguna Jawab : Plt. Kepala Dinas
- b. Ketua : Sekretaris
- c. Sekretaris : Sub Koord Penyusunan Program dan Keuangan
- Anggota :
  - 1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,Kualitas Keluarga Data dan Informasi
  - 2. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
  - 3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak
  - 4. Kepala Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Ketatalaksanaan.
  - 6. Sub Koord Penggerak Swadaya Masyarakat
  - 7. Sub Koord Penggerak Swadaya Masyarakat
  - 8. Sub Koord Penggerak Swadaya Masyarakat
  - 9. Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan
  - 10. Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan
  - 11. Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan
  - 12. Sub Koord Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan
  - 13. Sub Koord Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan
  - 14. Sub Koord Sub Koord Pengawas Pembimbing Kemasyarakatan

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 17 Maret 2025  
=====



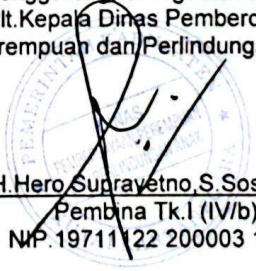
## KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu di susun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang disusun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang di laksanakan khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya di Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045. Lebih lanjut isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai program dan kegiatan serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, diharapkan rencana kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 07 Agustus 2025  
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

  
H. Hero Supravetno, S.Sos., M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19711122 200003 1002

## DAFTAR ISI

|                                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kata Pengantar .....                                                     | i             |
| Daftar isi.....                                                          | ii            |
| <b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>                                     | <b>1</b>      |
| 1.1.    Latar Belakang.....                                              | 1             |
| 1.2.    Landasan Hukum.....                                              | 3             |
| 1.3.    Maksud dan Tujuan.....                                           | 5             |
| 1.4.    Sistematika Penulisan.....                                       | 6             |
| <br><b>BAB II        EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU .....</b> | <br><b>8</b>  |
| 2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra        | 8             |
| 2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....                             | 21            |
| 2.3.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...         | 24            |
| 2.4.    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....                        | 26            |
| <br><b>BAB III        TUJUAN DAN SASARAN OPD .....</b>                   | <br><b>45</b> |
| 3.1.    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....                       | 45            |
| 3.2.    Tujuan dan Sasaran .....                                         | 48            |
| <br><b>BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....</b>               | <br><b>49</b> |
| 4.1.    Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....                          | 49            |
| <br><b>BAB V        PENUTUP.....</b>                                     | <br><b>61</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan Pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis terarah terpadu menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan yang berjangka panjang, menengah dan jangka pendek, sebagaimana di amanatkan dalam UU nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah harus menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah juga melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dimana penyelenggaraan Tata Pemerintah melakukan Pengintegrasian Gender melalui kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran.





Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 di mana Renja merupakan dokumen perencanaan OPD untuk 1(satu) tahunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Rencana Kerja memuat visi misi tujuan kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan di capai selama kurun waktu 1 tahun .

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan hasil-hasilnya.

Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

Dalam RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sesuai Visi Bupati yaitu : **“TERWUJUDNYA FONDASI PUSAT PANGAN, PARIWISATA DAN INDUSTRI HIJAU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN “** diamanatkan lima misi pembangunan Kutai Kartanegara dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



Anak masuk pada misi ke pertama yaitu **“TERBAIK DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN DAN PEMERATAAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL”** Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai OPD pendukung yang juga mempunyai tanggungjawab terhadap terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah. memiliki arah pembangunan yang lebih terukur dan terstruktur dalam meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta mendukung pemenuhan hak-hak anak dan pemberdayaan kelompok rentan, sehingga berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara: “Kutai Kartanegara Idaman Terbaik : Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun pelaksanaan Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 memperhatikan kepada peraturan Perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja dan arah garis kebijakan terkait yang di rumuskan antara lain :

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonnesia nomor 4438;
- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 9) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 20) Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

**Maksud** dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah :

1. Untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2025-2029.
2. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.





**Tujuan** dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu :

- 1 Menciptakan keterpaduan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Daerah.
- 2 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu terarah dan terukur.
- 3 Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan Operasional Tahunan dalam rentang waktu 1 tahun.
- 4 Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA –PD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

### **BAB IV RENACANA KERJA DAN PENDANAAN**

4.1. Program dan Kegiatan

### **BAB V PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja –PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD**

Proses Penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut, hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja (RENJA) suatu Perangkat Daerah adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut, tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur, Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan



kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah di tetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran dan hasil. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini di ikuti dengan penetapan besarnya indicator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah di tetapkan. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja di lakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini di lakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Adapun capaian analisis kinerja dan rekapitulasi pelaksanaan Renja sebagaimana mestinya.

Pada tahun 2026 Rencana Kerja Dinas PPPA dengan indikator yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah pada tahun tersebut sebanyak 7 Program terdiri dari 1 program Generik dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 1 indikator Outcome dan 6 program wajib dengan Outcome yang ingin dicapai sebanyak 6 indikator Outcome dengan pagu program kegiatan yang direncanakan sebesar Rp. 28.475.488.947,-

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu 2024 dan realisasi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD .

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator kinerja program Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp.13.622.20.063,- dan realisasinya Rp. 11.892.156.653,- atau sebesar 87.30% capaian kinerja 100%. Target kinerja tercapai.
- 2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase ARG belanja langsung APBD tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 9.060.321.884,- dan realisasinya Rp. 8.446.174.632,- atau sebesar 93.22% capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 3) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak indikator kinerja program adalah Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Gender tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- realisasinya Rp. 230.582.968,- atau 94.18 % capaian kinerja sebesar 100% . Target kinerja tercapai.



- 4) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Persentase Kabupaten Layak Anak tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 1.130.000.000,- realisasinya Rp. 996.002.742,- atau 88.14 % capaian kinerja sebesar 100% . Target kinerja tercapai .
- 5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.327.816.000,- realisasinya Rp. 1.162.455.849,- atau 87.55% capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
- 6) Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.769.431.000,- realisasinya Rp. 1.440.437.056,- atau 81.41% capaian kinerja sebesar 90%. Kendala yang dihadapi :
  - a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang sering berubah-ubah
  - b. Jangkauan pendampingan jauh dari perkotaan
  - c. Jaringan telekomunikasi yang kurang lancar
  - d. Solusi/Rekomendasinya mengkoordinasikan secara intens dengan pihak terkait supaya penjadwalan sesuai rencana
- 7) Program Perlindungan Khusus Anak Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2024 yaitu dengan anggaran sebesar Rp.1.315.700.000,- realisasinya capaian kinerja sebesar Rp.1.059.752.324,- atau 80.55%, capaian kinerja sebesar 90%. Kendala yang dihadapi adalah :
  - a. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak maksimal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran terhadap pelayanan perlindungan khusus anak.
  - b. Letak geografis yang jauh dalam penjangkauan kasus yang belum didukung dengan tenaga profesional yang masih kurang.
  - c. Solusi/Rekomendasinya rencana anggaran kas tiap triwulan, penambahan tenaga profesional dan pemenuhan sarana dan prasarana





Sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan anggaran dari tahun 2023, anggaran yang dikelola oleh Dinas PPPA sebesar 28.475.488.947,- atau terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp. 6.954.892.544,- atau 24.42% sehingga akan berpengaruh terhadap capaian indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Program yang akan ditargetkan sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indikator kinerja program adalah Persentase ARG belanja langsung APBD target 16.10%,
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Indikator Persentase PD yang memiliki Data Gender 58.62%.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga Indikator kinerja Persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak target 50%.
4. Program Perlindungan Perempuan Indikator kinerja Cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan target 100%
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Indikator kinerja program adalah Persentase Kabupaten Layak Anak target 750%
6. Program Perlindungan Khusus Anak Indikator Kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten target 100%



**Tabel 2.1 (TC\_29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022**  
**Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                                                                                                | Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD)<br><br>Tahun 2021-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2025) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |                                 |                       | Target program dan kegiatan (Renja-PD tahun 2025) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d tahun berjalan (2026) |                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                      | Target Renja-PD tahun (2024)                                        | Realisasi Renja-PD tahun (2024) | Tingkat Realisasi (%) |                                                   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2026)  | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                  | 5                                                                                    | 6                                                                   | 7                               | 8=(7/6)               | 9                                                 | 10=(5+7+9)                                                              | 11=(10/4)                                    |
|      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                          | Nilai SAKIP                                                                                                                                                            | 76,6                                                               | 70,76                                                                                | 76,45                                                               | 58,89                           | 77,03                 | 76,5                                              | 206,15                                                                  | 68,72                                        |
|      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 34                                                                 | 6                                                                                    | 9                                                                   | 9                               | 100                   | 6                                                 | 19                                                                      | 55,88                                        |
|      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen                                                                                                                                                         | 14                                                                 | 2                                                                                    | 6                                                                   | 6                               | 100                   | 6                                                 | 14                                                                      | 57,14                                        |
|      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20                                                                 | 4                                                                                    | 6                                                                   | 6                               | 100                   | 6                                                 | 16                                                                      | 60                                           |
|      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel                                                                                                   | 120                                                                | 24                                                                                   | 24                                                                  | 24                              | 100                   | 24                                                | 72                                                                      | 60                                           |
|      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 60                                                                 | 12                                                                                   | 12                                                                  | 12                              | 100                   | 12                                                | 36                                                                      | 60                                           |



|  |  |  |  |                                                                               |                                                                                                                                                    |       |      |      |      |     |      |      |    |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|-----|------|------|----|
|  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 60    | 12   | 12   | 12   | 100 | 12   | 36   | 60 |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>                                                                              | 20    | 4    | 4    | 4    | 100 | 4    | 12   | 60 |
|  |  |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | 20    | 4    | 4    | 4    | 100 | 4    | 12   | 60 |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>                                                                                                     | 5     | 1    | 1    | 1    | 100 | 1    | 3    | 60 |
|  |  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | 200   | 53   | 53   | 53   | 100 | 20   | 126  | 63 |
|  |  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                           | 35    | 7    | 7    | 7    | 7   | 7    | 21   | 60 |
|  |  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 100   | 20   | 1    | 1    | 100 | 20   | 60   | 60 |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | 60    | 12   | 2    | 2    | 100 | 12   | 36   | 60 |
|  |  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | 5000  | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 3000 | 60 |
|  |  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       | 10560 | 2112 | 2112 | 2112 | 100 | 2112 | 6336 | 60 |
|  |  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           | 27    | 1    | 1    | 1    | 100 | 1    | 3    | 11 |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | 265   | 53   | 53   | 53   | 100 | 53   | 159  | 60 |
|  |  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis                                                                                                         | 5     | 1    | 1    | 1    | 100 | 1    | 3    | 60 |
|  |  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                        | 30    | 0    | 16   | 16   | 100 | 16   | 32   | 55 |
|  |  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                     | 25    | 5    | 15   | 15   | 100 | 15   | 15   | 80 |
|  |  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                    | 5     | 1    | 1    | 1    | 100 | 1    | 3    | 75 |



|  |  |  |  |                                                                                                                    |                                                                                                                             |            |           |          |          |            |           |            |           |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan                                           | 60         | 12        | 8        | 8        | 100        | 12        | 36         | 60        |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                      | 60         | 12        | 12       | 12       | 100        | 12        | 36         | 60        |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                            | 175        | 35        | 8        | 8        | 100        | 35        | 105        | 26        |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                        | 60         | 12        | 4        | 4        | 100        | 12        | 36         | 60        |
|  |  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                     | 140        | 28        | 34       | 34       | 100        | 28        | 84         | 60        |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                      | 125        | 28        | 28       | 28       | 93,33      | 25        | 81         | 64,8      |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                      | 10         | 2         | 3        | 3        | 100        | 2         | 6          | 60        |
|  |  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                    | 5          | 1         | 3        | 3        | 100        | 1         | 3          | 60        |
|  |  |  |  | <b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                           | Cakupan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada organisasi kemasyarakatan                        | 26,49      | 22        | 16       | 8,48     | 69,65      | 12,18     | 29,14      | 110       |
|  |  |  |  | <b>2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>     | <b>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah dan Pemerintah Desa yang telah dilatih PUG</b>                                  | <b>155</b> | <b>52</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>260</b> | <b>56</b> | <b>124</b> | <b>80</b> |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 6          | 1         | 1        | 1        | 100        | 1         | 3          | 50        |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota         | 24         | 1         | 1        | 1        | 100        | 1         | 3          | 12        |



|  |  |  |  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |     |    |    |    |      |    |     |     |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|------|----|-----|-----|
|  |  |  |  | 2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 275 | 51 | 51 | 56 | 100  | 56 | 163 | 59  |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota               | 275 | 56 | 6  | 6  | 100  | 56 | 112 | 40  |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan                                                                       | 150 | 30 | 28 | 28 | 80   | 30 | 98  | 65  |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                              | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 100 | 20 | 20 | 20 | 62,5 | 9  | 49  | 49  |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi            | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota               | 105 | 21 | 28 | 28 | 75   | 21 | 70  | 66  |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota                       | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan                                                                                                                     | 85  | 27 | 28 | 28 | 0    | 22 | 77  | 93  |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota    | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                              | 100 | 2  | 28 | 28 | 0    | 2  | 32  | 32  |
|  |  |  |  | 2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota             | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                                                      | 60  | 20 | 20 | 20 | 0    | 20 | 20  | 100 |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |     |       |       |       |       |       |       |       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |  |  |  | 2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                           | 15  | 5     | 1     | 1     | 0     | 1     | 7     | 33,33 |
|  |  |  |  | <b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                  | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten                                                                             | 100 | 19,23 | 28,85 | 19,23 | 66,67 | 12,18 | 50,64 | 50,64 |
|  |  |  |  | <b>2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data                                                              | 15  | 2     | 6     | 6     | 66,67 | 2     | 10    | 66    |
|  |  |  |  | 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                               | 15  | 1     | 3     | 6     | 100   | 3     | 10    | 67    |
|  |  |  |  | 2.08.05.2.01.01 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | 15  | 1     | 3     | 3     | 33,33 | 3     | 7     | 47    |
|  |  |  |  | <b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                   | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif                                                                           | 100 | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |
|  |  |  |  | <b>2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                       | Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                                                                 | 40  | 1     | 20    | 20    | 0     | 1     | 22    | 55    |
|  |  |  |  | 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20  | 1     | 1     | 1     | 0     | 1     | 3     | 15    |
|  |  |  |  | 2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 20  | 0     | 5     | 5     | 0     | 0     | 5     | 25    |
|  |  |  |  | <b>2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>    | Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi                                                          | 160 | 41    | 50    | 50    | 100   | 41    | 132   | 83    |
|  |  |  |  | 2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                                    | 500 | 50    | 50    | 50    | 100   | 50    | 150   | 30    |





|  |  |  |  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |       |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|  |  |  |  | 2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota        | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 30  | 6   | 6   | 6   | 100 | 6   | 18  | 60    |
|  |  |  |  | <b>2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan                                                                                                  | 75  | 2   | 20  | 20  | 100 | 2   | 24  | 80    |
|  |  |  |  | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                                                  | 60  | 15  | 15  | 15  | 100 | 15  | 45  | 75    |
|  |  |  |  | 2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota              | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                       | 160 | 40  | 40  | 40  | 100 | 40  | 120 | 75    |
|  |  |  |  | 2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 20  | 0   | 1   | 1   | 100 | 1   | 3   | 15    |
|  |  |  |  | <b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                              | Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif                                                                                               | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   |
|  |  |  |  | <b>2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                              | Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah                                                                                                | 95  | 14  | 2   | 2   | 100 | 14  | 42  | 44,21 |
|  |  |  |  | 2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 60  | 22  | 22  | 22  | 100 | 11  | 55  | 92    |
|  |  |  |  | 2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 10  | 0   | 2   | 2   | 100 | 2   | 4   | 40    |
|  |  |  |  | <b>2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                | Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani                                                                                                                                        | 515 | 90  | 110 | 110 | 100 | 110 | 210 | 41    |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |      |     |     |     |       |     |      |    |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------|-----|------|----|
|  |  |  |  | 2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                    | 500  | 152 | 50  | 50  | 100   | 100 | 302  | 60 |
|  |  |  |  | 2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                         | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | 325  | 60  | 60  | 60  | 100   | 100 | 220  | 68 |
|  |  |  |  | <b>2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>             | Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk                                                                                                                                                                  | 135  | 25  | 25  | 25  | 100   | 25  | 75   | 56 |
|  |  |  |  | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota                                                                                               | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar                                                                                         | 50   | 10  | 8   | 8   | 0     | 30  | 48   | 96 |
|  |  |  |  | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                                                          | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                                                                                                              | 75   | 30  | 2   | 2   | 100   | 2   | 34   | 45 |
|  |  |  |  | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kabupaten/Kota                               | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK                                                                                                      | 250  | 50  | 50  | 50  | 100   | 30  | 130  | 52 |
|  |  |  |  | <b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                 | Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak                                                                                                                                                                         | 3500 | 710 | 730 | 710 | 97,26 | 750 | 1450 | 62 |
|  |  |  |  | <b>2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                           | Jumlah lembaga pemenuhan hak anak yang terbentuk                                                                                                                                                           | 60   | 6   | 30  | 30  | 100   | 10  | 46   | 77 |
|  |  |  |  | 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 140  | 4   | 30  | 30  | 100   | 28  | 62   | 44 |
|  |  |  |  | 2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                  | 13   | 2   | 1   | 2   | 125   | 4   | 8    | 62 |
|  |  |  |  | <b>2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                               | Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA                                                                                                                                 | 28   | 4   | 3   | 3   | 20    | 4   | 11   | 39 |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |     |      |       |      |     |      |       |       |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-----|------|-------|-------|
|  |  |  |  | 2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | 500 | 100  | 100   | 100  | 100 | 100  | 300   | 60    |
|  |  |  |  | 2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 12  | 1    | 1     | 1    | 100 | 1    | 4     | 33    |
|  |  |  |  | 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 5   | 2    | 1     | 1    | 100 | 2    | 5     | 100   |
|  |  |  |  | 2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 5   | 1    | 1     | 1    | 100 | 1    | 3     | 60    |
|  |  |  |  | <b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                                     | Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak                                                                           | 100 | 5,56 | 11,11 | 5,56 | 50  | 5,56 | 16,68 | 16,68 |
|  |  |  |  | <b>2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                    | Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak                                                                       | 5   | 1    | 3     | 3    | 100 | 1    | 5     | 100   |
|  |  |  |  | 2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | 5   | 2    | 3     | 3    | 100 | 2    | 7     | 140   |
|  |  |  |  | <b>2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak                                        | 18  | 1    | 5     | 5    | 100 | 1    | 7     | 16,67 |
|  |  |  |  | 2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                            | 65  | 3    | 5     | 5    | 100 | 3    | 9     | 39    |
|  |  |  |  | 2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 60  | 0    | 20    | 20   | 100 | 20   | 40    | 67    |



|  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |    |   |   |   |     |   |   |     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|-----|---|---|-----|
|  |  |  | 2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | 14 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 29  |
|  |  |  | <b>2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak                                                                                                  | 4  | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 125 |
|  |  |  | 2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 7  | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 43  |



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dasar pembentukan Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemetaan Kewenangan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPPO) untuk memerangi perdagangan orang membutuhkan penanganan yang komperhensif dan multi sektor, diharapkan pemerintah daerah (Kutai Kartanegara) memiliki kerangka hukum mengenai (PTPPPO) dan partisipasi setiap anggota masyarakat termasuk anggota keluarga untuk mengambil langkah pencegahan, untuk data perdagangan orang/trafficking, sebanyak 4 kasus tahun 2017, 1 kasus tahun 2022 dan 8 kasus tahun 2023.

Belum tersedianya pemetaan data khusus untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dengan adanya pemetaan kasus kekerasan ini dapat memudahkan dalam hal penanganan dimasing-masing desa /kecamatan

Perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan *trafficking* dan peningkatan layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski telah ada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di



Polda dan Polres, serta pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) di daerah, dan penyebaran informasi dan kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2022 kasus yang didampingi berjumlah 65 kasus dan tahun 2023 sebanyak 155 kasus, tahun 2024 sebanyak 197 kasus.

Untuk penanganan Korban Tindak Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu maka perlu dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penyediaan wadah Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi dalam penanggulangan dan perlindungan Perempuan dan Anak yaitu P2TP2A.

Dilihat dari visi dan misi bupati terpilih untuk RPJMD 2025 – 2029 dengan **Misi “Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”** adapun sasaran yang ingin dicapai Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dengan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

1. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
2. Persentase Anggaran Responsif Gender Daerah
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dari hasil pembahasan diatas berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan memberikan pelayanan yang maksimal dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2029. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Tabel 2.2



**Tabel 2.2 tentang  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Pelayanan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

| No | Indikator Kinerja Utama                                                            | SPM/<br>Standart Nasional | IKK | Target Renstra PD |       |       |       |       | Realisasi Capaian |       |       |      |      | Proyeksi |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|------|------|----------|--------|
|    |                                                                                    |                           |     | 2022              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022              | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2025     | 2026   |
| 1  | 2                                                                                  | 3                         | 4   | 5                 |       |       |       |       | 6                 |       |       |      |      | 7        |        |
| 1  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                       |                           |     | 76,35             | 76,40 | 76,45 | 76,5  | 76,60 | 76,40             | 74,90 | 58.89 |      |      | 100,00   | 100,00 |
| 2  | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                          |                           |     | 16,95             | 16,00 | 16,10 | 16,15 | 16,20 | 0,06              | 4.87  | 18.74 |      |      | 100,00   | 100,00 |
| 3  | Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten         |                           |     | 0,21              | 0,25  | 0,29  | 0,33  | 0,37  | 0,21              | 100   | 100   |      |      | 100,00   | 100,00 |
| 4  | Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) |                           |     | 0,015             | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,046 | 6,18              | 7.2   | 7.90  |      |      | 100,00   | 100,00 |





### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan perkembangan dan tantangan yang mutakhir dewasa ini, maka isu permasalahan yang masih dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

1. Belum Optimalnya Anggaran Responsif Gender di masing-masing Perangkat Daerah
2. Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan belum didampingi seluruhnya oleh tenaga terlatih
3. Belum terpenuhinya pelayanan penanganan kasus sesuai dengan SPM
4. Belum optimalnya para pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan yang responsif anak
5. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap hak-hak anak
6. Kelembagaan PUG di OPD belum optimal
7. Kurangnya perempuan sebagai pelaku ekonomi yang mendapat pembinaan

Dari permasalahan diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan kolaborasi dan dukungan instansi terkait dalam memberikan pelayanan dan peningkatan pemberdayaan perempuan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, social dan ekonomi.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang Kabupaten Kota Layak Anak, dan memperhatikan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 thn 2010 tanggal 26 juli 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk sebagai 10 Kabupaten / Kota Pengembang Kota / Kabupaten Kota Layak Anak, maka berkaitan dengan hal diatas dapat diidentifikasi Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam rancangan program pembangunan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). KLA adalah Pembangunan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu sistem Pembangunan Berbasis Pemenuhan Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang



terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pembangunan berbasis pada perwujudan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak secara tidak langsung akan memenuhi kebutuhan penataan ruang sebuah lingkungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Arahan Pengembangan Pelayanan OPD:

- a. Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- b. Jumlah Pojok ASI yang memadai dan layak, di tempat umum (Bandara, pusat perbelanjaan, terminal dll) tempat kerja;
- c. Ketersediaan Rumah Tangga dengan akses air bersih;
- d. Ketersediaan Kawasan tanpa asap rokok;
- e. Tersedianya sekolah yang ramah Anak;
- f. Ketersediaan dan kemudahan jangkauan Lembaga Kesejahteraan Anak;
- g. Tersedianya sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- h. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif yang ramah anak diluar sekolah dan dapat diakses semua anak;
- i. Tersedianya lembaga perlindungan anak bermasalah dengan hukum; dan
- j. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan keperluan anak.

Untuk menanggulangi permasalahan dan isu-isu diatas maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan salah satunya adalah melalui :

1. Program Perlindungan Perempuan dengan Indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
2. Program Perlindungan Anak dengan indikator Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan Indikator Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak



6. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Indikator Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dapat dilihat Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Renstra tahun 2025-2029 seperti dibawah ini :

| INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                     |                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Sasaran Strategis                                                           | Indikator Kinerja Utama         | Target       |
| 1. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dalam aktivitas pembangunan | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 82,10 persen |
| 2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak dalam Aktivitas Pembangunan      | Indeks Perlindungan Anak (IPA)  | 62,90 persen |



**Tabel T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Sesuai Renstra**  
**Kabupaten Kutai Kartanegara**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| No | Rancangan awal RKPD                                                                   |                       |                                                                                                                                                                        |        |         |                | No | Hasil Analisis Kebutuhan                                                              |                       |                                                                                                                                                                        |        |         |                | Catatan Penting                          | KET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|------------------------------------------|-----|
|    | Program/ Kegiatan                                                                     | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target | Satuan  | Pagu Indikatif |    | Program/ Kegiatan                                                                     | Lokasi                | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Target | Satuan  | Pagu Indikatif |                                          |     |
| 1  | 2                                                                                     | 3                     | 4                                                                                                                                                                      | 5      | 6       | 7              | 8  | 9                                                                                     | 10                    | 11                                                                                                                                                                     | 12     | 13      | 14             | 15                                       | 16  |
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Kab.Kutai Kartanegara | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 58,9   | Persen  | 10.944.373.547 | 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Kab.Kutai Kartanegara | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | 58,89  | Persen  | #####          |                                          |     |
| 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 9      | Dokumen | 550.000.000    | 1  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | 9      | Dokumen | 850.000.000    |                                          |     |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3      | dokumen | 150.000.000    | 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 3      | dokumen | 350.000.000    | Rapat kerja penyusunan RENSTRA, RENJA    |     |
| 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3      | laporan | 50.000.000     | 2  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3      | laporan | 150.000.000    | Musrenbang kecamatan dan capaian kinerja |     |
| 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1      | laporan | 100.000.000    | 3  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 1      | laporan | 100.000.000    | Monev, dan epantau                       |     |



|   |                                                                               |                       |                                                                                                                                                |          |                |                      |   |                                                                               |                       |                                                                                                                                                |          |                |                      |                                       |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| 4 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                  | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                              | 1        | Dokumen        | 100.000.000          | 4 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                  | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                              | 1        | Dokumen        | 100.000.000          | SDI                                   |  |
| 5 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                            | 1        | data           | 150.000.000          | 5 | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                            | 1        | data           | 150.000.000          | SDI                                   |  |
| 2 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>                                                                    | <b>4</b> | <b>Dokumen</b> | <b>6.908.364.933</b> | 2 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>                                                                    | <b>4</b> | <b>Dokumen</b> | <b>6.993.364.933</b> |                                       |  |
| 6 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              | 40       | orang/bulan    | 6.717.168.933        | 6 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                              | 40       | orang/bulan    | 6.717.168.933        |                                       |  |
| 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                             | 1        | laporan        | 50.000.000           | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                             | 1        | laporan        | 100.000.000          | Penyusunan laporan keuangan (LKPD)    |  |
| 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 2        | laporan        | 116.196.000          | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 2        | laporan        | 126.196.000          | Honorarium PA,KPA, PPK,BP,BPP         |  |
| 9 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                             | 1        | Dokumen        | 25.000.000           | 9 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                             | 1        | Dokumen        | 50.000.000           | Penyusunan Laporan keuangan Prognosis |  |



|    |                                                                   |                       |                                                                                                            |    |         |             |    |                                                                   |                       |                                                                                                            |    |         |             |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|--|--|
| 3  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>                                      | 3  | Laporan | 45.258.000  | 3  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>     | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>                                      | 3  | Laporan | 75.000.000  |  |  |
| 10 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                              | 1  | laporan | 8.500.000   | 10 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                              | 1  | laporan | 20.000.000  |  |  |
| 11 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1  | laporan | 21.758.000  | 11 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1  | laporan | 30.000.000  |  |  |
| 12 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1  | laporan | 15.000.000  | 12 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1  | laporan | 25.000.000  |  |  |
| 4  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian</b>                                                             | 1  | Dokumen | 754.724.250 | 4  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                  | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian</b>                                                             | 1  | Dokumen | 750.000.000 |  |  |
| 13 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        | 40 | orang   | 500.000.000 | 13 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                        | 40 | orang   | 500.000.000 |  |  |
| 14 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | 40 | orang   | 254.724.250 | 14 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                          | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                       | 40 | orang   | 250.000.000 |  |  |
| 5  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah</b>                                                   | 8  | Layanan | 490.614.400 | 5  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah</b>                                                   | 8  | Layanan | 760.653.800 |  |  |



|    |                                                                         |                       |                                                                                      |           |             |                    |    |                                                                         |                       |                                                                                      |           |             |                      |                               |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------|--|
| 15 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1         | paket       | 31.873.600         | 15 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1         | paket       | 80.000.000           |                               |  |
| 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 1         | paket       | 200.000.000        | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   | 1         | paket       | 200.000.000          |                               |  |
| 17 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1         | paket       | 8.500.000          | 17 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1         | paket       | 18.500.000           |                               |  |
| 18 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1         | dokumen     | 20.000.000         | 18 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1         | dokumen     | 20.000.000           |                               |  |
| 19 | Penyediaan Bahan /Material                                              | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          | 1         | paket       | 100.000.000        | 19 | Penyediaan Bahan /Material                                              | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                          | 1         | paket       | 100.000.000          |                               |  |
| 20 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | 1         | laporan     | 38.087.000         | 20 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             | 1         | laporan     | 50.000.000           |                               |  |
| 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1         | laporan     | 52.153.800         | 21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1         | laporan     | 252.153.800          | Perjadin Kadis dan Sekretaris |  |
| 22 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 1         | dokumen     | 40.000.000         | 22 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | 1         | dokumen     | 40.000.000           |                               |  |
| 6  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>                                          | <b>50</b> | <b>Unit</b> | <b>400.000.000</b> | 6  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>                                          | <b>50</b> | <b>Unit</b> | <b>1.500.000.000</b> |                               |  |
| 24 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30        | unit        | 250.000.000        | 24 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 30        | unit        | 250.000.000          |                               |  |





|    |                                                                              |                       |                                                                                                |          |                |                      |    |                                                                              |                       |                                                                                                |          |                |                      |                                                  |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 25 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20       | unit           | 150.000.000          | 25 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20       | unit           | 150.000.000          |                                                  |                                                            |
| 26 | Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional                                         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan                                       | 0        | unit           | -                    | 26 | Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional                                         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan                                       | 8        | unit           | 1.100.000.000        | Eselon III tidak punya mobdin karena rusak berat | 3 unit mobil dinas Eselon III dan 5 unit motor dinas ut JF |
| 7  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                       | <b>3</b> | <b>Laporan</b> | <b>1.050.635.964</b> | 7  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>                       | <b>3</b> | <b>Laporan</b> | <b>1.050.635.964</b> |                                                  |                                                            |
| 27 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1        | laporan        | 350.000.000          | 27 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1        | laporan        | 350.000.000          |                                                  |                                                            |
| 28 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 1        | laporan        | 40.000.000           | 28 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 1        | laporan        | 40.000.000           |                                                  |                                                            |
| 29 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1        | laporan        | 660.635.964          | 29 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 1        | laporan        | 660.635.964          |                                                  |                                                            |



|    |                                                                                                                     |                       |                                                                                                        |      |         |               |    |                                                                                                                     |                       |                                                                                                        |      |         |               |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|--|--|
| 8  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah                                                                | 27   | Unit    | 744.776.000   | 8  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah                                                                | 27   | Unit    | 744.776.000   |  |  |
| 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30   | unit    | 72.740.000    | 30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30   | unit    | 72.740.000    |  |  |
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4    | unit    | 22.036.000    | 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4    | unit    | 22.036.000    |  |  |
| 32 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3    | unit    | 650.000.000   | 32 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3    | unit    | 650.000.000   |  |  |
| 2  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                           | Kab.Kutai Kartanegara | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                                              | 16,1 | Persen  | 1.400.000.000 | 2  | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                           | Kab.Kutai Kartanegara | Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan   | 16,1 | Persen  | 1.650.000.000 |  |  |
| 9  | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota                       | 56   | Lembaga | 250.000.000   | 9  | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah dokumen pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota                       | 56   | Lembaga | 400.000.000   |  |  |



|    |                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                      |    |            |               |    |                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                      |    |            |               |         |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------------|---------|--|
| 34 | 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                          | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota           | 1  | Dokumen    | 75.000.000    | 34 | 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                          | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota           | 2  | Dokumen    | 100.000.000   | IKU OPD |  |
| 35 | 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG                                                                 | 1  | Laporan    | 75.000.000    | 35 | 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG                                                                 | 2  | Laporan    | 150.000.000   | IKU OPD |  |
| 36 | 2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | 28 | Lembaga    | 100.000.000   | 36 | 2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                   | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | 56 | Lembaga    | 150.000.000   | IKU OPD |  |
| 10 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan      | 28 | Organisasi | 1.050.000.000 | 10 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan      | 28 | Organisasi | 1.150.000.000 |         |  |



|    |                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                        |           |                |                    |           |                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                        |           |                |                    |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|--|--|
| 37 | 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi       | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 28        | Lembaga        | 950.000.000        | 37        | 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi       | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 28        | Lembaga        | 950.000.000        |  |  |
| 38 | 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi                                         | 20        | orang          | 50.000.000         | 38        | 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi                                         | 20        | orang          | 50.000.000         |  |  |
| 39 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan                                       | 20        | orang          | 50.000.000         | 39        | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan                                       | 60        | orang          | 150.000.000        |  |  |
| 11 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                     | <b>28</b> | <b>lembaga</b> | <b>100.000.000</b> | <b>11</b> | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                            | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                     | <b>28</b> | <b>lembaga</b> | <b>100.000.000</b> |  |  |



|    |                                                                                                                                     |                       |                                                                                             |            |                |                    |    |                                                                                                                                     |                       |                                                                                             |            |                |                    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--|--|
| 40 | 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan        | 28         | Lembaga        | 50.000.000         | 40 | 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan        | 28         | Lembaga        | 50.000.000         |  |  |
| 41 | .08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                      | 1          | Dokumen        | 50.000.000         | 41 | .08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                      | 1          | Dokumen        | 50.000.000         |  |  |
| 3  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                               | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</b> | <b>100</b> | <b>Persen</b>  | <b>925.000.000</b> | 3  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                               | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</b> | <b>100</b> | <b>Persen</b>  | <b>925.000.000</b> |  |  |
| 12 | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>                                       | <b>2</b>   | <b>Dokumen</b> | <b>125.000.000</b> | 12 | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>                                       | <b>2</b>   | <b>Dokumen</b> | <b>125.000.000</b> |  |  |
| 42 | 2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 1          | dokumen        | 75.000.000         | 42 | 2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 1          | dokumen        | 75.000.000         |  |  |



|    |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                           |          |                |                    |    |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                           |          |                |                    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|--|--|
| 43 | 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | 10       | lembaga        | 50.000.000         | 43 | 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | 10       | lembaga        | 50.000.000         |  |  |
| 13 | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                  | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota</b>                    | <b>6</b> | <b>Layanan</b> | <b>600.000.000</b> | 13 | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                  | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota</b>                    | <b>6</b> | <b>Layanan</b> | <b>600.000.000</b> |  |  |
| 44 | 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                      | 50       | orang          | 500.000.000        | 44 | 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                     | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                      | 50       | orang          | 500.000.000        |  |  |
| 45 | 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                             | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                             | 50       | orang          | 100.000.000        | 45 | 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                             | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                             | 50       | orang          | 100.000.000        |  |  |



|    |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                           |           |                |                    |    |                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                           |           |                |                    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|--|--|
| 14 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>6</b>  | <b>Layanan</b> | <b>200.000.000</b> | 14 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>6</b>  | <b>Layanan</b> | <b>200.000.000</b> |  |  |
| 46 | 2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | <b>10</b> | Lembaga        | <b>50.000.000</b>  | 46 | 2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | <b>10</b> | Lembaga        | <b>50.000.000</b>  |  |  |
| 47 | 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek                                                                        | 30        | orang          | 100.000.000        | 47 | 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                               | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek                                                                        | 30        | orang          | 100.000.000        |  |  |
| 48 | 2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                    | 1         | dokumen        | 50.000.000         | 48 | 2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                    | 1         | dokumen        | 50.000.000         |  |  |



|    |                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                |           |                |                    |    |                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                |           |                |                    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|--|--|
| 4  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                                | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak</b>                                                  | <b>50</b> | <b>Persen</b>  | <b>300.000.000</b> | 4  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                                | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak</b>                                                  | <b>50</b> | <b>Persen</b>  | <b>300.000.000</b> |  |  |
| 15 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</b>               | <b>6</b>  | <b>Lembaga</b> | <b>150.000.000</b> | 15 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</b>               | <b>6</b>  | <b>Lembaga</b> | <b>150.000.000</b> |  |  |
| 49 | 2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                           | 10        | Lembaga        | 100.000.000        | 49 | 2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                           | 10        | Lembaga        | 100.000.000        |  |  |
| 50 | 2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota | 10        | Lembaga        | 50.000.000         | 50 | 2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota | 10        | Lembaga        | 50.000.000         |  |  |





|    |                                                                                                                             |                       |                                                                                                                          |       |         |             |    |                                                                                                                             |                       |                                                                                                                          |       |         |             |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|--|--|
| 16 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak                                                 |       |         | 150.000.000 | 16 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak                                                 |       |         | 150.000.000 |  |  |
| 51 | 2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota                                             | 20    | orang   | 75.000.000  | 51 | 2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota                                             | 20    | orang   | 75.000.000  |  |  |
| 52 | 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota                                 | 20    | orang   | 75.000.000  | 52 | 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota               | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota                                 | 20    | orang   | 75.000.000  |  |  |
| 5  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                             | Kab.Kutai Kartanegara | Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak                                                           | 81,03 | Persen  | 50.000.000  | 5  | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                             | Kab.Kutai Kartanegara | Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak                                                           | 81,03 | Persen  | 50.000.000  |  |  |
| 17 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota | 2     | Dokumen | 50.000.000  | 17 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota | 2     | Dokumen | 50.000.000  |  |  |



|    |                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                    |    |                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                |            |                |                    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--|--|
| 53 | 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                               | 1          | Dokumen        | 50.000.000         | 53 | 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                               | 1          | Dokumen        | 50.000.000         |  |  |
| 6  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak</b>                                                                                                                                                                                      | <b>750</b> | <b>Nilai</b>   | <b>275.000.000</b> | 6  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak</b>                                                                                                                                                                                      | <b>750</b> | <b>Nilai</b>   | <b>425.000.000</b> |  |  |
| 18 | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                  | <b>2</b>   | <b>Dokumen</b> | <b>125.000.000</b> | 18 | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                  | <b>2</b>   | <b>Dokumen</b> | <b>125.000.000</b> |  |  |
| 55 | 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 10         | Lembaga        | 75.000.000         | 55 | 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 10         | Lembaga        | 75.000.000         |  |  |



|    |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                |          |                |                    |    |                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                |          |                |                    |         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|---------|--|
| 56 | 2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1        | laporan        | 50.000.000         | 56 | 2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1        | laporan        | 50.000.000         |         |  |
| 19 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                    | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b>4</b> | <b>Dokumen</b> | <b>150.000.000</b> | 19 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                    | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b>4</b> | <b>Dokumen</b> | <b>300.000.000</b> |         |  |
| 57 | 2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek                                                          | 20       | Orang          | 50.000.000         | 57 | 2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek                                                          | 40       | Orang          | 100.000.000        | iku opd |  |
| 58 | 2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 1        | Dokumen        | 50.000.000         | 58 | 2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      | 2        | Dokumen        | 100.000.000        | iku opd |  |



|    |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                         |            |                |                      |    |                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                         |            |                |                      |         |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------|---------|--|
| 59 | 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan | 10         | Lembaga        | 50.000.000           | 59 | 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan | 20         | Lembaga        | 100.000.000          | iku opd |  |
| 7  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif</b>                        | <b>100</b> | <b>Persen</b>  | <b>1.200.000.000</b> | 7  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif</b>                        | <b>100</b> | <b>Persen</b>  | <b>1.500.000.000</b> |         |  |
| 20 | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>2</b>   | <b>dokumen</b> | <b>150.000.000</b>   | 20 | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>2</b>   | <b>dokumen</b> | <b>250.000.000</b>   |         |  |
| 60 | 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                   | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota           | 2          | dokumen        | 100.000.000          | 60 | 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                   | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota           | 2          | dokumen        | 100.000.000          |         |  |



|    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                |            |              |                    |    |                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                |            |              |                      |         |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|---------|--|
| 61 | 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1          | laporan      | 50.000.000         | 61 | 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 2          | laporan      | 150.000.000          | iku opd |  |
| 21 | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>        | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>                                        | <b>200</b> | <b>orang</b> | <b>900.000.000</b> | 21 | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>        | Kab.Kutai Kartanegara | <b>Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>                                        | <b>200</b> | <b>orang</b> | <b>1.000.000.000</b> |         |  |
| 62 | 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                | 100        | orang        | 700.000.000        | 62 | 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                | 100        | orang        | 700.000.000          | iku opd |  |
| 63 | 2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | 50         | orang        | 100.000.000        | 63 | 2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                 | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | 50         | orang        | 100.000.000          | iku opd |  |
| 66 | 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                       | 50         | orang        | 100.000.000        | 66 | 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                         | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                       | 50         | orang        | 200.000.000          | iku opd |  |



|    |                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                               |    |         |                |    |                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                               |    |         |                |                                              |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|----------------------------------------------|--|
| 22 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk                                                                                                                                                     | 2  | Dokumen | 150.000.000    | 22 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk                                                                                                                                                     | 2  | Dokumen | 250.000.000    |                                              |  |
| 67 | 2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | 10 | Lembaga | 100.000.000    | 64 | 2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | 10 | Lembaga | 100.000.000    |                                              |  |
| 68 | 2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 1  | Dokumen | 50.000.000     | 65 | 2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Kab.Kutai Kartanegara | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 3  | Dokumen | 150.000.000    | IKU OPD (sasaran OPD, Ormas dan Dunia Usaha) |  |
|    |                                                                                                                                                                            |                       | <u>Jumlah</u>                                                                                                                                                                                 |    |         | 15.094.373.547 |    |                                                                                                                                                                            |                       | <u>Jumlah</u>                                                                                                                                                                                 |    |         | 17.574.430.697 |                                              |  |



### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Melalui Strategi Nasional (STRANAS) Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender (PPRG), berdasarkan permasalahan, sasaran, serta arah Kebijakan Nasional, maka strategi PPRG meliputi strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum mengacu pada dua permasalahan yang dihadapi adalah penerapan PPRG di tingkat Nasional dan daerah yaitu :

- a. Penguatan Dasar Hukum
- b. Penguatan koordinasi baik antar sesama Instansi Penggerak maupun antar Penggerak dengan Instansi Pelaksana.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum yaitu penguatan koordinasi melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan antara lain dapat dilihat :

- 1) Belum optimalnya dukungan politik terhadap Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Prioritas Pembangunan
- 2) Belum memadainya kelembagaan dalam pelaksanaan PUG terutama sumber daya manusia serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan.
- 3) Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep Isu Gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

Masalah lainnya adalah belum tersedianya data terpilah sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan.

Lambatnya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesenjangan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan yang signifikan yang antara lain disebabkan oleh :

- (1) Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/Kota,
- (2) Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang Politik, Jabatan Publik dan di Bidang Ekonomi,
- (3) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit.



- (4) Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD, belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam menemu-kenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pentingnya data terpilah, mengidentifikasi masalah dan dapat dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial, ekonomi, waktu, yang dalam analisisnya menggunakan Analisa Gender. Bentuk data terpilah bisa kuantitatif atau kualitatif, dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender :
- a. Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
  - b. Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;
  - c. Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, karena data terpilah dan perencanaan serta analisa gendernya jika sudah tersedia, akan mudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

Tantangan dan permasalahan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semakin bertambah berat dan kompleks. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting dan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran tersebut. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat yang dapat menjadi penghalang pencapaian tujuan atau sasaran. Diperlukan kerja keras dan upaya yang serius agar target tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Berikut ini akan diuraikan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DINAS PP & PA ditinjau dari sasaran jangka menengah RENSTRA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun RENSTRA DINAS PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu berfokus pada upaya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan yang Responsif Gender di Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Keamanan, kemudian memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak serta memperhatikan tumbuh kembang anak.

Beberapa faktor penghambat yang dihadapi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian sasaran di atas antara lain :

- a. Diskriminasi dari pemberi pekerjaan terhadap tenaga kerja perempuan;
- b. Tingkat kompetitif perempuan yang rendah ;
- c. Kurangnya pemahaman pihak-pihak terkait/ stakeholder mengenai PUG;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan;
- e. Kurangnya akses pendidikan bagi perempuan;
- f. Kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan;
- g. Belum adanya sistem layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. Budaya *patriarckhi* di masyarakat;





- i. Kurangnya komitmen kepala daerah dan sinergitas lintas sektor;
- j. Kurangnya koordinasi dan sinergitas kegiatan LSM/LM, ORMAS pemerhati perempuan dan anak;
- k. Kebijakan daerah belum *responsive gender*;
- l. Data Terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / SKPD; dan
- m. Belum didukung oleh kualitas dan kuantitas tenaga yang handal.

Namun demikian terdapat kondisi yang merupakan faktor pendorong pelayanan Dinas PP PA Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mengatasi permasalahan pelayanan dan dapat mendorong pencapaian sasaran tersebut. Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah:

- a) Masih terbukanya kesempatan kerja yang luas;
- b) Telah adanya regulasi yang *responsive gender*;
- c) Telah adanya program pengentasan kemiskinan;
- d) Telah adanya Komitmen Kepala Daerah mengenai PUG;
- e) Telah adanya Regulasi terkait Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f) Telah adanya Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang KLA;

Di Bidang Partisipasi Anak telah diterbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, dan 2 (dua) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Anak, sampai dengan Tahun 2016 terbentuk FORUM Anak di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa se Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu bentuk wadah partisipasi anak. Partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan sudah dilibatkan baik ditingkat Nasional maupun di daerah. Di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara sejak Tahun 2013 melibatkan Forum Anak dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu Kementerian PPPA juga mengikutsertakan Forum Anak Daerah dalam Konferensi Tingkat Asia yang di laksanakan di Kota Solo, yang membahas tentang partisipasi anak dan Kabupaten / Kota Layak Anak, serta seleksi anak berbakat melalui Tunas Muda Pemimpin Indonesia (TMPI) di Tingkat Provinsi KALTIM.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi yang baik antara lintas OPD sehingga mempersulit penanganannya terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Disamping itu jumlah guru disekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas, sehingga banyak tidak dapat bersekolah di sekolah umum Inklusi. Data ABK dari SLB tahun 2014 berjumlah 111 orang dan di tahun 2015 berjumlah 125 Orang. Ini menunjukkan anak penyandang disabilitas dari seluruh anak di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun meningkat.

Permasalahan sosial anak mencakup area yg cukup luas dan merupakan isu lintas sektoral, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak ). Anak



korban penyalahgunaan narkoba yang dibina dikalapas KelasII B Tenggarong pada tahun 2014 berjumlah 22 orang dan tahun 2015 sebanyak 15 orang. Yang perlu diperhatikan lagi yaitu zat adiktif lainnya diantaranya anak menghisap lem semakin marak dan meresahkan masyarakat hampir disetiap Kecamatan,di Kabupaten Kutai Kartanegara ada anak yang melakukan hal tersebut. Perkawinan usia anak masih banyak terutama di desa-desa terpencil. Masalah sosial yang dialami oleh anak pada umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik dan keluarga yang tidak utuh (broken home).

Capaian pembangunan anak, kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada 3 (tiga) hal yaitu : pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip – prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah :

- a. Non – Diskriminasi : yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik, asal kebangsaan suku, status ekonomi, kondisi fisik anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mengupayakan semua keputusan kegiatan dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata mata untuk kepentingan terbaik untuk anak.
- c. Mengutamakan hak anak untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya.
- d. Menghormati pandangan anak ,yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya.

Upaya percepatan pemilikan akte kelahiran dilakukan melalui penetapan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada 24 Desember 2013. MoU delapan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran.

Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABDH) dengan diterapkannya undang-undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak maka anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan rehabilitasi (anak ini diberikan hak-haknya terutama untuk memperoleh pendidikan walaupun berhadapan dengan hukum).

Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PP PA RI pada Tahun 2006 bersama 4 (empat) Kabupaten/Kota menjadi KABUPATEN MENUJU KOTA LAYAK ANAK (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) dengan Pendukung PERDA NO 9 Tahun 2004 Tentang ZONA BEBAS



PEKERJA ANAK. Pada Tahun 2013 Presiden RI melalui Kementerian PP PA menunjuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu dari 5 Kabupaten / Kota di Indonesia untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI nomor 56 Tahun 2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Penunjukan & Penetapan Kabupaten/Kota Yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak bersama 5 daerah Kabupaten /Kota lainnya menganugerahkan KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA sebagai KABUPATEN KOTA LAYAK ANAK di Tingkat PRATAMA dari 37 Kabupaten/Kota se Indonesia. Untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, di pandang perlu adanya :

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 334/ SK – Bup/ HK/ 2012 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Pengembangan Layak Anak (KLA).
2. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 1 Tahun 2012 tentang pengembangan Program dan Anggaran terhadap percepatan Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) bagi setiap OPD sesuai dengan Indikator dan Tupoksi OPD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KECAMATAN DAN KELURAHAN / DESA Penbentukan
4. Bahkan Anak berhadapan dengan hukum harus melanjutkan sekolah dari tingkat SD / SLTP / MTS / Pesantren / SLTA / dan Perguruan Tinggi di fasilitasi oleh TIM KOORDINASI PENANGANAN MASALAH SOSIAL PEREMPUAN DAN ANAK DI TK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. Dalam rangka memenuhi hak dan melindungi anak di lembaga pendidikan, pada tahun 2014 KEMEN PPPA menggagas tersusunya Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) bersama 9 (Sembilan) K / L terkait (Kementerian PPPA RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPN, dan BPOM), lembaga masyarakat, lembaga Internasional, lembaga pemerhati anak dan pakar anak.

Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak & perlindungan anak. Alasan mengapa Kabupaten/Kota Layak Anak perlu dilaksanakan karena:

- a. Anak adalah amanah Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan secara pribadi dan sosial;
- b. Jumlah anak 29 - 35% dari total penduduk , tidak bisa diabaikan;
- c. Perubahan global mengancam tata nilai agama, sosial, dan budaya lokal;
- d. Embrio SDM yang handal dan tangguh menentukan masa depan bangsa dan negara; dan
- e. Anak terancam menjadi korban kekerasan, pelecehan, dikriminasi, perlakuan salah.



Pengembangan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, yang mana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan pada tingkat Pratama dan tahun 2020-2023 kategori Madya dan Tahun 2024 mendapatkan Kategori Madya dengan adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh SKPD terkait supaya mendukung dan dapat mengintegrasikan kegiatannya kedalam program SKPD masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

**Maksud** dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Kutai Kartanegara Periode 2025-2029. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara memuat tujuan dan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan.

**Tujuan** : Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan dengan Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

**Sasaran** :

- 1 : Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dalam aktivitas pembangunan dengan Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 2 : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak dalam Aktivitas Pembangunan dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indikator tujuan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .



## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 1.1 Program dan Kegiatan

#### a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas PP & PA Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi, misi dan program bupati dan wakil bupati. Dalam upaya pemberian layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                 | PERMASALAHAN PD                                              | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                              | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD                 |                                                                     |                                                              | ISU STRATEGIS PD                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                              |                                                              | GLOBAL                                                        | NASIONAL                                                            | REGIONAL                                                     |                                                              |
| (1)                                                                       | (2)                                                          | (3)                                                          | (4)                                                           | (5)                                                                 | (6)                                                          | (7)                                                          |
| Penguatan kelembagaan PUG dan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan | Ketimpangan Gender dalam Akses dan Partisipasi               | Ketimpangan pembangunan berbasis gender                      | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) SDG 5: Gender Equality | RPJMN: Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan                | Rendahnya IPG dan IDG Kalimantan Timur                       | Ketimpangan Gender dalam Akses dan Partisipasi               |
| Pengembangan UPTD PPA dan PPATBM di wilayah kabupaten                     | Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak        | Kerentanan sosial akibat kekerasan berbasis gender           | Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)  | RAN PPA, RAN TPPO, dan RANHAM                                       | Tingginya angka kekerasan di Kutai Kartanegara               | Tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak        |
| Penyediaan layanan perlindungan sosial berbasis masyarakat                | Kesenjangan Akses terhadap Layanan Perlindungan Sosial       | Aksesibilitas layanan dasar untuk kelompok rentan            | Agenda inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan global      | Penguatan sistem perlindungan sosial nasional                       | Belum meratanya layanan sosial di wilayah desa dan terpencil | Kesenjangan Akses terhadap Layanan Perlindungan Sosial       |
| Fasilitasi keluarga tangguh dan ramah anak dalam pembangunan desa         | Degradasi Lingkungan dan Dampaknya pada Kelompok Rentan      | Ketahanan lingkungan dan pengaruhnya pada perempuan dan anak | Perubahan iklim dan dampak sosial terhadap kelompok rentan    | PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Tingginya kerentanan bencana banjir dan kebakaran lahan      | Degradasi Lingkungan dan Dampaknya pada Kelompok Rentan      |
| Edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui                   | Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kesetaraan Gender dan | Perubahan nilai sosial dan budaya terkait kesetaraan         | Kampanye global untuk kesetaraan dan anti-                    | Permendagri 67/2011 tentang PUG di daerah                           | Masih kuatnya budaya patriarkal dan relasi kuasa timpang     | Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Kesetaraan Gender dan |



| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                | PERMASALAHAN PD                                          | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                            | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD             |                                                                           |                                                                         | ISU STRATEGIS PD                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                          |                                                            | GLOBAL                                                    | NASIONAL                                                                  | REGIONAL                                                                |                                                          |
| (1)                                                      | (2)                                                      | (3)                                                        | (4)                                                       | (5)                                                                       | (6)                                                                     | (7)                                                      |
| Forum Anak dan DRPPA                                     | Perlindungan Anak                                        |                                                            | kekerasan gender                                          |                                                                           |                                                                         | Perlindungan Anak                                        |
| Penguatan sistem kesiapsiagaan sosial berbasis komunitas | Ketahanan Sosial di Tengah Perubahan Ekonomi dan Bencana | Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan krisis | Transformasi sosial menuju masyarakat tangguh dan adaptif | Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem | Dampak relokasi IKN terhadap perubahan sosial dan beban kelompok rentan | Ketahanan Sosial di Tengah Perubahan Ekonomi dan Bencana |

## b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi, maka kegiatan pada Dinas PP dan PA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 mengalami perubahan baik dari jumlah kegiatan dan rencana pagu dana. Adapun jumlah kegiatan dalam tahun 2026 adalah sebanyak 22 Kegiatan dan 7 Program.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Renstra Kementerian dan Provinsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada perubahan terhadap indikator program :

| No | Program/Pembangunan                                              | Indikator                                                                                      | Cara Hitung                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> | <b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>                                               | <b>Jumlah ARG pada Belanja langsung APBD dibagi jumlah Seluruh Anggaran Belanja Langsung X100%</b>                                              |
| 2. | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>           | <b>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten</b> | <b>Jumlah PD yang memiliki data gender dibagi jumlah PD X100%</b>                                                                               |
| 3. | <b>Program Perlindungan Perempuan</b>                            | <b>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</b>    | <b>Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dibagi Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO X100%</b> |



| No | Program/Pembangunan                          | Indikator                                                                                 | Cara Hitung                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>      | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif | Jumlah Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif<br><b>DIBAGI</b> Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus<br><b>X100%</b> |
| 5. | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>      | Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak                                                        | Jumlah 5 klaster penilaian KLA dari Kementerian PPPA                                                                                                                |
| 6. | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b> | Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak    | Jumlah pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk <b>DIBAGI</b> Jumlah Kecamatan <b>X100</b>                                                                        |

**c. Rumusan Program dan Kegiatan tidak Sesuai dengan Rancangan awal**

Dalam melakukan perumusan Program dan kegiatan sejauh ini masih sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, Akan tetapi dari penetapan pagu Indikatif terdapat beberapa perubahan dalam penyusunan renja akhir Tahun 2026, yaitu adanya **Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA)** yang saat ini sedang dalam proses usulan untuk Pembangunan gedung sebagai bentuk pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat yang memerlukan perlindungan terhadap Perempuan dan anak.





#### d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel T-C.33.  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026  
Kabupaten Kutai Kartanegara

| Kode      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan            | Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                       | Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)          |                        |                               |             | Catatan Penting                                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                       |                                                                                                                                                                        | Lokasi                                      | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                                               | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 1         | 2                                                                                     | 3                                                                                                                                                                      | 4                                           | 5                      | 6                             | 7           | 8                                                             | 9                                 | 10                             |
| 2 8 1     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Nilai Sakip Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Kab.Kutai Kartanegara                       | 70,76                  | 10.944.373.547                | APBD        |                                                               | 70,76                             | 12.568.234.733                 |
| 2 8 1 2   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Kab.Kutai Kartanegara                       | 9 dokumen              | 550.000.000                   | APBD        |                                                               | 9 dokumen                         | 700.000.000                    |
|           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen              | 150.000.000                   | APBD        | Rapat kerja penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA/DPA                | 3 dokumen                         | 250.000.000                    |
| 2 8 1 2 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab.Kutai Kartanegara                       | 3 dokumen              | 50.000.000                    | APBD        | Musrenbang, pendampingan SPIP, LKJIP, LPPD, Sakip, Rakor DPPA | 3 dokumen                         | 100.000.000                    |
| 2 8 1 2 6 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Kab.Kutai Kartanegara                       | 1 laporan              | 100.000.000                   | APBD        | Monev kegiatan dinas, Pendampingan Epantau                    | 1 laporan                         | 100.000.000                    |
| 2 8 1 2 7 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara                       | 1 laporan              | 100.000.000                   | APBD        | data SDI                                                      | 1 laporan                         | 100.000.000                    |
|           | Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah                                                                    | Kab.Kutai Kartanegara                       | 1 dokumen              | 150.000.000                   | APBD        | data SDI                                                      | 1 dokumen                         | 150.000.000                    |
|           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel                                                                                                   | Kab.Kutai Kartanegara                       | 3 dokumen              | 6.908.364.933                 | APBD        |                                                               | 3 dokumen                         | 6.987.168.933                  |
| 2 8 1 2   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara                       | 40 orang/bulan         | 6.717.168.933                 | APBD        | Gaji ASN, TPP                                                 | 40 orang/bulan                    | 6.717.168.933                  |





|   |   |   |     |    |  |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                              |                  |                    |             |                                                                                                                      |                  |                    |
|---|---|---|-----|----|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|   |   |   |     |    |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 50.000.000         | APBD        | Honor PA, KPA, PPK, bendahara pengeluaran, LK, Manajemen RTP, rapat kerja keuangan                                   | 1 laporan        | 100.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2   | 1  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Kab.Kutai Kartanegara        | 2 laporan        | 116.196.000        | APBD        | laporan keuangan                                                                                                     | 2 laporan        | 120.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2   | 7  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                                                                 | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen        | 25.000.000         | APBD        | laporan prognosis keuangan                                                                                           | 1 dokumen        | 50.000.000         |
|   |   |   |     |    |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                   | <b>Jumlah laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>                                                                              | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>3 laporan</b> | <b>45.258.000</b>  | <b>APBD</b> |                                                                                                                      | <b>3 laporan</b> | <b>75.000.000</b>  |
|   |   |   |     |    |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | Jumlah laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 8.500.000          | APBD        | inventarisasi kebutuhan BMD                                                                                          | 1 laporan        | 20.000.000         |
| 2 | 8 | 1 | 2   |    |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                         | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 21.758.000         | APBD        |                                                                                                                      | 1 laporan        | 30.000.000         |
| 2 | 8 | 1 | 2   | 5  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                   | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 15.000.000         | APBD        | Laporan BMD, inventaris aset, rapat kerja urusan BMD, Rekon BMD                                                      | 1 laporan        | 25.000.000         |
|   |   |   |     |    |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                | <b>Jumlah dokumen administrasi kepegawaian</b>                                                                                                     | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>1 dokumen</b> | <b>754.724.250</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                                      | <b>1 dokumen</b> | <b>750.000.000</b> |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 |    |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                | Kab.Kutai Kartanegara        | 40 orang         | 500.000.000        | APBD        | Bimtek arsip, bimtek manajemen pelayanan dan RB, bimtek IT / Statistik, bimtek perencanaan, bimtek program keuangan, | 40 orang         | 500.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 |    |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                               | Kab.Kutai Kartanegara        | 40 orang         | 254.724.250        | APBD        | Sosialisasi peraturan perundangan PPA dan peraturan lainnya                                                          | 40 orang         | 250.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 10 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                       | <b>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah</b>                                                                                           | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>8 layanan</b> | <b>490.614.400</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                                      | <b>8 layanan</b> | <b>760.653.800</b> |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 2  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 paket          | 31.873.600         | APBD        | Alat Tulis Kantor                                                                                                    | 1 paket          | 80.000.000         |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 9  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 paket          | 200.000.000        | APBD        | Makan minum rapat dan peralatan rumah tangga                                                                         | 1 paket          | 200.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2   |    |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 paket          | 8.500.000          | APBD        | Kalender, Map, Souvenir, Merchandise                                                                                 | 1 paket          | 18.500.000         |



|   |   |   |     |    |  |                                                                              |                                                                                                |                              |                  |                      |             |                                                                                                       |                  |                      |
|---|---|---|-----|----|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 2  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen        | 20.000.000           | APBD        | Perpustakaan anak dan perempuan, pojok baca                                                           | 1 dokumen        | 20.000.000           |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 4  |  | Penyediaan Bahan /Material                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                    | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 paket          | 100.000.000          | APBD        | Pameran Merah Putih, Erau dll (homestay, sewa stand, design pameran, makan minum pameran, doorprize)  | 1 paket          | 100.000.000          |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 5  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 38.087.000           | APBD        |                                                                                                       | 1 laporan        | 50.000.000           |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 6  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 52.153.800           | APBD        | Fasilitasi Kadis, Sekretaris, Kabid, Kasubag, ASN, JF                                                 | 1 laporan        | 252.153.800          |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 7  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen        | 40.000.000           | APBD        | Tata kelola arsip                                                                                     | 1 dokumen        | 40.000.000           |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 8  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>Jumlah pengadaan barang milik daerah</b>                                                    | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>50 unit</b>   | <b>400.000.000</b>   | <b>APBD</b> |                                                                                                       | <b>50 unit</b>   | <b>1.500.000.000</b> |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 10 |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | Kab.Kutai Kartanegara        | 30 unit          | 250.000.000          | APBD        | Mebeuleir                                                                                             | 30 unit          | 250.000.000          |
| 2 | 8 | 1 | 2   |    |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kab.Kutai Kartanegara        | 20 unit          | 150.000.000          | APBD        | Komputer, Printer, Laptop                                                                             | 20 unit          | 150.000.000          |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 9  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional                                         | Jumlah unit kendaraan bermotor penumpang yang Disediakan                                       | Kab.Kutai Kartanegara        | unit             | -                    | APBD        | Kendaraan dinas mobil kabit dan mobil pelayanan serta mobil angkut pickup, sepeda motor               | unit             | 1.100.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 10 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>                     | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>6 laporan</b> | <b>1.050.635.964</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                       | <b>6 laporan</b> | <b>1.050.636.000</b> |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 11 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 350.000.000          | APBD        | Listrik dan Wifi MPPA                                                                                 | 1 laporan        | 350.000.000          |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 2  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 40.000.000           | APBD        | Perawatan peralatan komputer, AC, sound system, printer, mesin foto copy dll                          | 1 laporan        | 40.000.000           |
| 2 | 8 | 1 | 2   |    |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan        | 660.635.964          | APBD        | Honorarium THL, tenaga ahli progremer, statistik, IT, Jurnalis, CS, Satpam, Psikolog Klinis, Konselor | 1 laporan        | 660.636.000          |
|   |   |   |     |    |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah</b>                                                 | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> |                  | <b>744.776.000</b>   | <b>APBD</b> |                                                                                                       |                  | <b>744.776.000</b>   |



|   |   |   |     |   |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                              |                            |                      |             |                                                                            |                            |                    |
|---|---|---|-----|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 2 |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                                 | Kab.Kutai Kartanegara        | 30 unit                    | 72.740.000           | APBD        |                                                                            | 30 unit                    | 72.740.000         |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 3 |   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                 | Kab.Kutai Kartanegara        | 4 unit                     | 22.036.000           | APBD        |                                                                            | 4 unit                     | 22.036.000         |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 4 |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                               | Kab.Kutai Kartanegara        | 3 unit                     | 650.000.000          | APBD        | Rehab gedung serba guna, untuk forum anak dan satgas PPA (ex gedung BKKBN) | 3 unit                     | 650.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2   |   |   | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                                                  | <b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>                                                                                                                                       | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>16,10 persen</b>        | <b>1.400.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                            | <b>16,10 persen</b>        | <b>950.000.000</b> |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 1 |   | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                  | <b>Jumlah dokumen pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                 | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>56 perangkat daerah</b> | <b>250.000.000</b>   | <b>APBD</b> |                                                                            | <b>56 perangkat daerah</b> | <b>500.000.000</b> |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 2 |   | 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen                  | 75.000.000           | APBD        | Pelaksanaan penyusunan RAD PUG (Lokus Tenggarong) IKU OPD                  | 1 dokumen                  | 150.000.000        |
| 2 | 8 | 1 | 2,1 | 9 |   | 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG                                                                                                                   | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan                  | 75.000.000           | APBD        | Pembentukan tim Pokja PUG kab. Kukar berdasarkan SK Bupati. IKU OPD        | 1 laporan                  | 150.000.000        |
| 2 | 8 | 2 |     |   |   | 2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)                                                   | Kab.Kutai Kartanegara        | 28 lembaga                 | 100.000.000          | APBD        | Pendampingan penyusunan PPRG (GBS dan GAP). IKU OPD                        | 28 lembaga                 | 200.000.000        |
| 2 | 8 | 2 | 2   | 2 |   | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan</b>                                                 | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>28 organisasi</b>       | <b>1.050.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                            | <b>28 organisasi</b>       | <b>450.000.000</b> |
|   |   |   |     |   | 3 | 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Kab.Kutai Kartanegara        | 28 lembaga                 | 950.000.000          | APBD        | Rakor lembaga/organisasi perempuan (DW) kab. Kukar.                        | 28 lembaga                 | 150.000.000        |



|   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                              |                   |                    |             |                                                                                                          |                   |                      |
|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2.08.02.2.02.0008 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota           | jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi            | Kab.Kutai Kartanegara        | 20 orang          | 50.000.000         | APBD        | Sosialisasi peraturan perundangan untuk peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang polhum dan sosek. | 50 orang          | 150.000.000          |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      | jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan          | Kab.Kutai Kartanegara        | 20 orang          | 50.000.000         | APBD        | Pelatihan tata kelola layanan pemberdayaan perempuan. (Lokus Tenggarong)                                 | 50 orang          | 150.000.000          |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 3 |   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                        | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>28 lembaga</b> | <b>100.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                          | <b>0</b>          | <b>-</b>             |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota              | jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara        | 28 lembaga        | 50.000.000         | APBD        |                                                                                                          | 0                 | -                    |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | .08.02.2.03.0008 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                             | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                    | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen         | 50.000.000         | APBD        |                                                                                                          | 0                 | -                    |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                            | <b>Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif</b>                                                               | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>100 persen</b> | <b>925.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                          | <b>100 persen</b> | <b>1.000.000.000</b> |
| 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     | <b>Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan</b>                                                                                                     | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>2 dokumen</b>  | <b>125.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                          | <b>2 dokumen</b>  | <b>250.000.000</b>   |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen         | 75.000.000         | APBD        |                                                                                                          | 1 dokumen         | 100.000.000          |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota | Kab.Kutai Kartanegara        | 10 lembaga        | 50.000.000         | APBD        |                                                                                                          | 10 lembaga        | 150.000.000          |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 2 |   | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                  | <b>Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>6 layanan</b>  | <b>600.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                          | <b>6 layanan</b>  | <b>600.000.000</b>   |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                      | Kab.Kutai Kartanegara        | 50 orang          | 500.000.000        | APBD        | IKU OPD                                                                                                  | 50 orang          | 500.000.000          |



|   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                              |                  |                    |             |                                                                                                                                            |                  |                    |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                             | Kab.Kutai Kartanegara        | 50 orang         | 100.000.000        | APBD        | IKU OPD                                                                                                                                    | 50 orang         | 100.000.000        |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 |   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                             | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>6 layanan</b> | <b>200.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                                                            | <b>6 layanan</b> | <b>150.000.000</b> |
|   |   |   |   |   |   | 2.08.03.2.03.0005 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Kab.Kutai Kartanegara        | 10 lembaga       | 50.000.000         | APBD        |                                                                                                                                            | 0                | -                  |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 |   | 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                           | jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek                                                                        | Kab.Kutai Kartanegara        | 30 orang         | 100.000.000        | APBD        | Pelatihan/Bimtek manajemen penanganan kasus bagi SDM, ASN, UPT P2TP2A, Tenaga Teknis profesional pada DP3A. (Lokus Samarinda / Balikpapan) | 50 orang         | 150.000.000        |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.08.03.2.03.0009 Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                    | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen        | 50.000.000         | APBD        |                                                                                                                                            | 0                | -                  |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                                                | <b>Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak</b>                                                             | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>50 persen</b> | <b>300.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                                                            | <b>50 persen</b> | <b>400.000.000</b> |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 2 |   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak</b>                          | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>6 lembaga</b> | <b>150.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                                                            | <b>6 lembaga</b> | <b>300.000.000</b> |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas                                                      | Kab.Kutai Kartanegara        | 10 lembaga       | 100.000.000        | APBD        |                                                                                                                                            | 10 lembaga       | 150.000.000        |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.08.04.2.02.0008 Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota            | Kab.Kutai Kartanegara        | 10 lembaga       | 50.000.000         | APBD        |                                                                                                                                            | 10 lembaga       | 150.000.000        |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 |   | <b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak</b>                                                                           | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>40 orang</b>  | <b>150.000.000</b> | <b>APBD</b> |                                                                                                                                            | <b>40 orang</b>  | <b>100.000.000</b> |



|   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                              |                     |                    |             |         |                     |                    |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------|---------------------|--------------------|
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2.08.04.2.03.0002 layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                   | Kab.Kutai Kartanegara        | 20 orang            | 75.000.000         | APBD        |         | 30 orang            | 100.000.000        |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.08.04.2.03.0004 layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                                           | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Kab.Kutai Kartanegara        | 20 orang            | 75.000.000         | APBD        |         | 0                   | -                  |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                                                  | <b>Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data Profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten</b>                                                                                                                                 | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>16,07 persen</b> | <b>50.000.000</b>  | <b>APBD</b> |         | <b>16,07 persen</b> | <b>100.000.000</b> |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      | <b>Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota</b>                                                                                                | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>1 dokumen</b>    | <b>50.000.000</b>  | <b>APBD</b> |         | <b>1 dokumen</b>    | <b>100.000.000</b> |
| 2 | 8 | 4 |   |   |   | 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                                                                                               | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen           | 50.000.000         | APBD        |         | 1 dokumen           | 100.000.000        |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 1 |   | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                                                 | <b>Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>690 nilai</b>    | <b>275.000.000</b> | <b>APBD</b> |         | <b>690 nilai</b>    | <b>650.000.000</b> |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | <b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                | <b>Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                 | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>2 dokumen</b>    | <b>125.000.000</b> | <b>APBD</b> |         | <b>2 dokumen</b>    | <b>200.000.000</b> |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota            | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara        | 10 lembaga          | 75.000.000         | APBD        |         | 10 lembaga          | 200.000.000        |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.08.06.2.01.0006 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 laporan           | 50.000.000         | APBD        |         | 1 laporan           | -                  |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |   | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                    | <b>Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                    | <b>Kab.Kutai Kartanegara</b> | <b>4 dokumen</b>    | <b>150.000.000</b> | <b>APBD</b> |         | <b>4 dokumen</b>    | <b>450.000.000</b> |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.08.06.2.02.0005 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek                                                                                                          | Kab.Kutai Kartanegara        | 20 orang            | 50.000.000         | APBD        | IKU OPD | 40 orang            | 150.000.000        |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara        | 1 dokumen           | 50.000.000         | APBD        | IKU OPD | 1 dokumen           | 150.000.000        |



|   |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                       |            |               |      |         |            |               |
|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|------|---------|------------|---------------|
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                               | jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan                                                                                              | Kab.Kutai Kartanegara | 10 lembaga | 50.000.000    | APBD | IKU OPD | 10 lembaga | 150.000.000   |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 3 |   | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                                    | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif                                                                                                                            | Kab.Kutai Kartanegara | 100 persen | 1.200.000.000 | APBD |         | 100 persen | 1.400.000.000 |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | <b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                         | Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Kab.Kutai Kartanegara | 2 dokumen  | 150.000.000   | APBD |         | 2 dokumen  | 300.000.000   |
| 2 | 8 | 5 |   |   |   | 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                                                 | jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                                                                                        | Kab.Kutai Kartanegara | 2 dokumen  | 100.000.000   | APBD | IKU OPD | 2 dokumen  | 100.000.000   |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 |   | 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Kab.Kutai Kartanegara | 1 laporan  | 50.000.000    | APBD | IKU OPD | 1 laporan  | 200.000.000   |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                           | Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Kab.Kutai Kartanegara | 200 orang  | 900.000.000   | APBD |         | 200 orang  | 950.000.000   |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                      | Kab.Kutai Kartanegara | 100 orang  | 700.000.000   | APBD | IKU OPD | 100 orang  | 700.000.000   |
| 2 | 8 | 6 |   |   |   | 2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                             | Kab.Kutai Kartanegara | 50 orang   | 100.000.000   | APBD | IKU OPD | 50 orang   | 100.000.000   |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 1 |   | 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Kab.Kutai Kartanegara | 50 orang   | 100.000.000   | APBD | IKU OPD | 50 orang   | 150.000.000   |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk                                                                                                                                                                            | Kab.Kutai Kartanegara | 2 dokumen  | 150.000.000   | APBD |         | 2 dokumen  | 150.000.000   |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) | Kab.Kutai Kartanegara | 10 lembaga | 100.000.000   | APBD |         | 10 lembaga | -             |



|   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                       |           |                |      |         |           |                |
|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------|------|---------|-----------|----------------|
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 |  | 2.08.07.2.03.0012 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kab.Kutai Kartanegara | 1 dokumen | 50.000.000     | APBD | IKU OPD | 1 dokumen | 150.000.000    |
|   |   |   |   |   |  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | Jumlah                |           | 15.094.373.547 |      | Jumlah  |           | 17.068.234.733 |





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026. Adapun proses penyusunan RKPD Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja pemerintah, maka dengan beberapa catatan sebagai berikut :

a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum memadai terutama untuk keperluan printer dan komputer yang sudah banyak mengalami rusak berat.
2. Keadaan kantor yang masih belum representatif untuk menyelenggarakan organisasi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak khususnya ruangan untuk menangani kekerasan perempuan dan anak serta keperluan ruang arsip dan ruang barang rusak.
3. Ketiadaan sumber daya aparatur yang khusus untuk menangani perempuan dan anak korban kekerasan dari segi psikologis menjadikan kendala bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi.
4. Banyak lokasi korban kekerasan pada perempuan dan anak yang memerlukan biaya besar untuk dijangkau.
5. Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) yang masih memerlukan bangunan fasilitas sapsras dan SDM

b) Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak disesuaikan dengan adanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditunjuk langsung oleh Presiden RI melalui Kementerian PPPA RI pada Tahun 2006 bersama empat kabupaten/kota menjadi kabupaten menuju Kabupaten Layak Anak (Sidoarjo, Gorontalo, Jambi, Solo, dan Kutai Kartanegara) diperkuat dengan Instruksi Bupati Kutai Kartanegara nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) di Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Dalam menentukan arah jalannya organisasi salah satunya



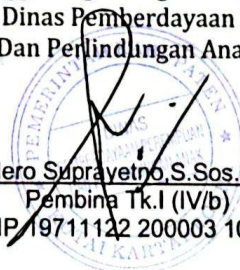
adalah Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c) Rencana Tindak Lanjut.

1. Mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pendirian aktifis Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat (PPATBM) di setiap kecamatan dan di setiap desa ataupun kelurahan.
2. Mendorong upaya pembinaan pelaku usaha perempuan dalam rangka meningkatkan perekonomian perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Mendorong OPD baik OPD di Kabupaten maupun OPD kecamatan untuk menginisiasi Kecamatan Layak Anak
4. Mendorong Pembangunan Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh disiplin, dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, 07 Agustus 2025  
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak

  
H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19711122 200003 1002